

IMPLIKASI PERUBAHAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN PADA SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)

Eko Susilo¹, Didik G. Suharto², Rinda Noviyanti³

Universitas Terbuka, Indonesia^{1,3}

Universitas Sebelas Maret, Indonesia²

Email: eko.susilo@gmail.com¹, didikgusuharto@staff.uns.ac.id²,
rinda@ecampus.ut.ac.id³

Abstrak

Dokumen merupakan produk akhir dari pelaksanaan administrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan public yang terkait dengan adanya surat keterangan, surat Keputusan, surat ketetapan atau surat lainnya. Dokumen sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh pemerintah memberikan dampak hukum, sosial, keuangan dan dampak lainnya. Salah satu hal penting dalam pengaturan di UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan dari Pasal 17 adalah nomenklatur atau tata nama. Penelitian dengan analisis dokumen. Analisa Dokumen untuk pengujian PMK untuk kesesuaian atau ketepatan. SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kestauan Republik Indonesia) adalah dasar pedoman yang menjadikan penelitian ini. Dimana SANKRI merupakan unsur struktur dan proses pada sistem administrasi dan pelayanan publik dalam rangka menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Implikasi Perubahan pada kelembagaan, organisasi, sumberdaya manusia dan asset. Hasil Penelitian menunjukkan adanya kesesuaian sesuai ketentuan dalam UUD 1945 amandemen keempat. Kesimpulan penelitian pada intinya adalah gambaran kesesuaian pada kelembagaan dan ketidaksesuaian secara organisasi dalam PMK dalam praktik sehari-hari atas produk hukum yang diterbitkan periode tahun 2002 dengan fokus pada data penelitian di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena pada ketentuan peralihan tidak ditemukan adanya pengakuan mengenai bagaimana dokumen produk hukum yang berlaku antara waktu diterbitkan dengan PMK atau tidak adanya pengaturan yang lebih tinggi mengenai kebenaran dokumen yang tidak sesuai tersebut. Penulis menemukan solusi tidak terbatas pada hasil penelitian bahwa pada setiap ketentuan dalam bentuk pengaturan atau regeling pada ketentuan peralihan jika ada pemecahan pemekaran Kementerian maka harus dibuat dengan cara membuat konsep bona fide atau ex tempore.

Kata kunci: nomenklatur, kementerian negara, implikasi, perubahan sistem input proses dan output, kesesuaian nomenklatur Kementerian, SANKRI

Abstract

Documents are the final product of the implementation of government administration in providing public services related to the existence of certificates, decrees, decrees or other letters. Documents as a product produced by the government have legal, social, financial and other impacts. One of the important things in the regulation in the 1945 Constitution is as stipulated in Article 17. One important thing in the implementation of Article 17 is the nomenclature or nomenclature. Research with document analysis. Document Analysis for FMD testing for conformity or accuracy. SANKRI (State Administration System of the Republic of Indonesia) is the basis of the guidelines that make this research. Where SANKRI is an element of structure and process in the administration system and public services in

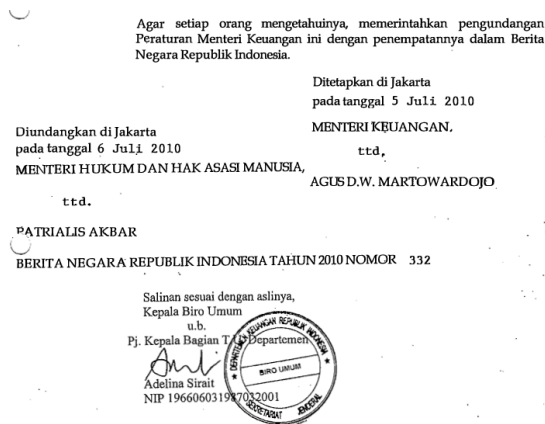
order to achieve Good Governance. Implications of Changes on institutions, organizations, human resources and assets. The results of the research show that there is conformity in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the fourth amendment. The conclusion of the study is essentially an overview of institutional conformity and organizational inconsistency in PMK in the daily practice of legal products published in the period of 2002 with a focus on research data from 2008 to 2010 because in the transitional provisions there is no recognition of how legal product documents are valid between the time of issuance and PMK or the absence of higher regulations regarding the authenticity of the non-compliant documents. The author found that the solution is not limited to the results of the research that in each provision in the form of regulation or reggeling in the provisions of the Ministry, if there is a breakdown of the expansion of the Ministry, it must be made by making the concept of bona fide or ex tempore.

Keywords: *nomenclature, state ministries, implications, changes in the process and output input system, conformity of the nomenclature of the Ministry, SANKRI*

Pendahuluan

Tahun 2002 adalah tahun diputuskannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sampai dengan tahun 2008 terdapat suatu pengaturan mengenai Kementerian negara. Pengaturan tersebut adalah Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Fakta yang ditemui oleh peneliti meski sudah dilakukan perubahan masih ditemui dokumen negara baik untuk kepnetingan individu maupun kelompok (organisasi) yang masih menggunakan kata Departemen (Bo'a, 2018; Deng, 2019; Suaedi, 2010).

Khusus untuk Kementerian Keuangan Dokumen yang digunakan adalah Surat Edaran Nomor 11/MK.1/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan. Fakta yang terjadi penyebutan nomenklatur yang ada pada Keputusan yang diterbitkan masih menggunakan kata "Departemen".



Gambar 1. Contoh Pengaturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan-di edit (diambil pada bagian cap dinas) sesuai dengan keperluan penelitian

Teori yang menjadikan landasan berifikir adalah teori sistem (input-proses-output) (Banga, 2018), teori Sistem Administrasi Publik pada sistem terbuka (Silalahi, 2017) dan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) (LAN, 2005) sebagaimana dikemukakan oleh Karyana (2011). Kemudian secara teoritis merujuk pada Model Analisis Model Van Meter dan Van Horn, Model Mazmanian dan Sabatier serta Model Matriks Ambiguitas Konflik Matland. peneliti menekankan pada teori

Matriks Ambiguitas Konflik Matland. Teori lain sebagaimana di kutip sebagaimana dikemukakan oleh Dwight Waldo bahwa proses administrasi terdiri dari tindakan yang terlibat dalam mempengaruhi maksud atau keinginan pemerintah. Dengan demikian ini merupakan “bisnis” pemerintah yang aktif secara terus menerus, yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, sebagaimana dibuat oleh badan hukum (atau agen otoritatif lainnya) dan ditafsirkan oleh pengadilan, melalui proses organisasi dan manajemen (Akbar, 2015; Asshiddiqie et al., 2021; Asshiddique, 2005; Karyana, 2011)

Penelitian sebelumnya di tahun 2010 berkaitan secara langsung mengenai perubahan nomenklatur adalah oleh Andiko, Handayani dan Mayowan (2018) dan lebih kuat lagi adalah keinginan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dituangkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di tahun 2016 yang artinya pemisahan tersebut akan memberikan dampak mengenai sisi pengaturan pemisahan yang dirujuk yaitu Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK. Hal Dasar sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie adalah pendapat mengenai perkembangan dalam ketatanegaraan setelah perubahan keempat atas UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002 adalah perubahan pada tingkat teknis dan operasional yang menjadi berbeda. Penelitian yang sebelumnya dilakukan meski tidak berkaitan secara langsung pada pengaturan yang lebih mendalam mengenai pengaturan adalah penelitian oleh Sinaga (2016) yang mengemukakan bahwa perubahan nomenklatur Kementerian menyebabkan keterlambatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan terlambatnya penetapan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) menjadi APBN dan RAPBN selanjutnya.

Penelitian lainnya dalam bentuk thesis juga dapat diketahui bahwa perubahan nama atau nomenklatur akan menyebabkan penataan perubahan pada struktur fungsi dan tugasnya, Kodefikasi Barang Milik Negara dan hal teknis lainnya. hal teknis inilah yang menjadi masalah pada akhirnya.

Latar belakang tersebut penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan Gambaran mengenai implikasi perubahan nomenklatur serta mencari Solusi atas masalah yang ada yaitu bagaimana kesesuaian implikasi perubahan nomenklatur di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

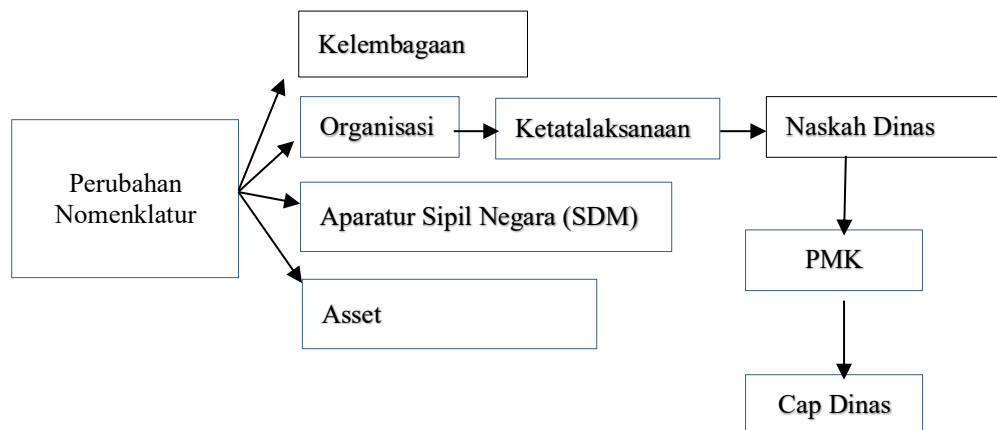
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitik. Peneliti melakukan penelitian dengan kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena perubahan atas pengalaman peneliti selama berkarir di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peneliti menggambarkan perubahan nomenklatur dari Departemen ke Kementerian atas kesesuaiannya.

Analisa yang digunakan adalah analisa dokumen oleh Plat J atau lebih dikenal dengan Jhon J Creswell (Creswell & Creswell, 2017) mengenai keaslian, kredibilitas, keterwakilan dan makna untuk menguji dokumen atau data yang digunakan dalam penelitian apakah valid atau tidak, Analisa Miles dan Hubermas untuk menggambarkan bagaimana dokumen dan Analisa atas data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang digunakan. Analisa Matriks Ambiguitas Konflik Maltland digunakan untuk menguji kesesuaian atau ketepatan atas PMK dan data untuk memperjelas kualitas kesesuaian dikumpulkan dengan cara kuesioner dan wawancara.

Subyek Penelitian adalah Pegawai di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II pada jabatan Eseleon II yaitu Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Eselon III dengan jabatan Eselon III, Eselon IV dengan Jabatan Kepala Seksi sesuai bidang masing-masing sebagai informan dan Obyek Penelitian adalah Pearturan Menteri Keuangan (PMK) atau PMK.

Sumber data diperoleh dari yang menerbitkan produk PMK yaitu Kementerian Keuangan melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) secara manual dating langsung ke lokasi dan melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemenkeu. Wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Rudy Gunawan Bastari dengan seijin dan persetujuan untuk berkenan dilakukan wawancara.



Gambar 2. Dampak Perubahan Nomenklatur

Sumber: Peneliti (2025)

Hasil dan Pembahasan

Analisa Dokumen

Prinsip yang digunakan adalah bahwa hanya dengan satu data dapat digunakan untuk penelitian namun untuk memberikan perbandingan serta menambah kejelasan data diminta data sesuai keperluan penelitian (Daft, 2019; Puspasari & Irawan, 2018; Shienlia, 2022). Dokumen yang dilakukan penelitian diketahui bahwa dokumen yang diperoleh memiliki keaslian, memiliki kredibilitas, mewakili dan memiliki makna yang jelas untuk dilaksanakan penelitian. Jumlah dokumen yang ada dari tahun 2002 adalah 776 PMK dan fokus pada penelitian terkait dengan Surat Edaran Nomor-11/MK.1/2010 sesuai fokus penelitian dari tahun 2008 s.d 2020 adalah sebanyak 36 dengan setiap tahun penetapan berjumlah 12.

Dari 36 PMK tersebut yang menggunakan kata Departemen dan bukan Kementerian dikumpulkan dibuat kategori. Dari data tersebut kemudian dilakukan pengelompokan dan reduksi data yang menggambarkan bahwa semua dokumen ditemukan pada Judul PMK, Kop PMK dan Cap Dinas masih menggunakan Kata Departemen. Penyajian data dalam bentuk tabel, flowchart baris, Grafik untuk memberikan Gambaran. Data diolah dengan Microsoft Ecxl dengan Barcode, Tabel, Grafik dan Pie. Bentuk penyajian data tersebut untuk dapat menggambarkan dengan jelas mengenai dokumen dan penggambaran yang jelas mengenai bagian kop, judul, dan cap dinas yang digunakan.

Dampak Penelitian difokuskan pada Kelembagaan, Organisasi dengan penekanan pada Asset dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia.

Analisa Miles dan Hubermas

Dapat dikumpulkan data, direduksi dan disajikan, dilakukan analisa data serta ditarik kesimpulan dari data-data yang ada :

a. Pengumpulan Data

Hasil pengumpulan data adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Penetapan dan Pengundangan atas PMK dan KMK tahun 2008 sampai dengan 2010

No	Tahun	Jumlah PMK	Jumlah KMK	Total
1.	2008	256	11	267
2.	2009	238	21	259
3.	2010	282	64	346
Jumlah		776	96	872

b. Reduksi Data

Dilakukan reduksi data dengan kriteria dapat dibaca jelas, tidak dapat dibaca dengan jelas

Tabel 2. Rekapitulasi Dokumen Bebas Distorsi

PMK	Distorsi	
	Dapat dibaca jelas	Tidak dapat dibaca dengan jelas
2008	256	0
2009	238	0
2010	282	0
Jumlah	776	0
KMK		
2008	11	0
2009	21	0
2010	64	0
Jumlah	96	0

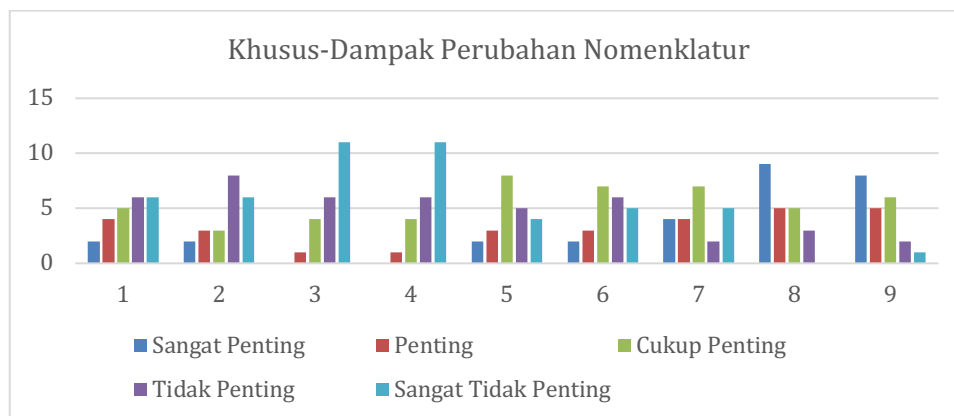
c. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan pie chart dan dilakukan Analisa pada dokumen dengan peneluran isi PMK yang terdiri atas judul, tahun terbit, tanggal terbit, isi atau materi, cap dinas yang berisikan nomenklatur secara tertulis.

Tabel 3. Jumlah PMK yang akan dibubuhi barcode

2008	2009
PMK-251/PMK.03/2008	PMK-236/PMK.03/2009
PMK-252/PMK.03/2008	PMK-237/PMK.03/2009
PMK-253/PMK.03/2008	PMK-238/PMK.03/2009
PMK-254/PMK.03/2008	PMK-239/PMK.03/2009
PMK-255/PMK.03/2008	PMK-240/PMK.03/2009
PMK-256/PMK.03/2008	PMK-241/PMK.03/2009
PMK-257/PMK.03/2008	PMK-242/PMK.03/2009
PMK-258/PMK.03/2008	PMK-246/PMK.03/2009
PMK-261/PMK.02/2008	PMK-247/PMK.03/2009
2010	
PMK-125/PMK.03/2009	
PMK-126/PMK.03/2009	
PMK-127/PMK.03/2009	

2008	2009
PMK-128/PMK.03/2009	
PMK-129/PMK.03/2009	
PMK-130/PMK.03/2009	
PMK-131/PMK.03/2009	
PMK-132/PMK.03/2009	
PMK-133/PMK.03/2009	
PMK-134/PMK.03/2009	
PMK-135/PMK.03/2009	
PMK-136/PMK.03/2009	



Gambar 3. Khusus Dampak Perubahan Nomenklatur

Pertanyaan pada kuesioner ditunjukkan dengan kata penting untuk memberikan penekanan pada tujuan penelitian apakah penulisan yang tidak sesuai tersebut dianggap penting ataukah tidak penting menurut ukuran kerja serta kinerja yang memberikan dampak nyata pada penerimaan pajak di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tersebut.



Gambar 4. Contoh barcode pada PMK

Dari penyajian data tersebut berupa uraian, tabel, garfik, pie chart dan pemberian kode klasifikasi dengan barcode dan dilakukan analisa sebagai suatu data yang bersumber atas dokumen yang valid.

Analisa Data

Analisa pada dokumen yang diketahui tersebut bahwa sebagaimana dalam tabel diketahui semua dokumen masih menggunakan kata departemen dan tidak menggunakan kata Kementerian yang artinya meskipun dalam Undang-undang Dasar 1945 pada amandemen keempat sudah berubah dan meskipun sudah ada Undang-undang yang

mengatur mengenai Kementerian Negara semua PMK masih menggunakan kata departemen yang artinya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Data berjumlah 36 yang digunakan dengan tema tahun penerbitan yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatrnnya dan digunakan untuk menerbitkan produk hukum di semua Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik itu secara teknis operasional maupun secara material yang disebutkan dalam isi PMK. Kop surat yang memiliki fungsi sebagai identitas, judul PMK, isi di bagian pasal-pasal serta ayat-ayat yang digunakan masih menggunakan Departemen, dan pada Cap Dinas juga menggunakan kata Departemen sedangkan pada ketentuan naskah dinas, cap dinas memiliki fungsi keabsahan suatu surat keputusan atau ketetapan.

Selama waktu tersebut, penerimaan pajak tidak terganggu terkait dokumen menurut peneliti yang peroleh melalui pengamatan media massa atau tempat peneliti bekerja ketahui,

Perubahan Nomenklatur

a. Kelembagaan

Tidak menimbulkan dampak karena sudah dengan jelas diatur sesuai dnegan ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

b. Organisasi

Beberapa pengaturan masih menggunakan kata departemen dan masih digunakan sampai saat dilakukan penelitian sebelum ada perubahan peraturan peundang-undnagan yang baru. Penggunaan kata departemen tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya pembubuhan cap dinas pad naskah dinas dalam bentuk pengaturan yang sudah berubah.

Tidak terdapatnya pengaturan yang menyatakan benar dan dianggap sah atas penggunaannya tersebut kecuali adanya pendapat yang menyatakan bahwa sebelum dicabut pengaturannya ketentuan yang mengatur di dalamnya dapat digunakan dan dijadikan pedoman.

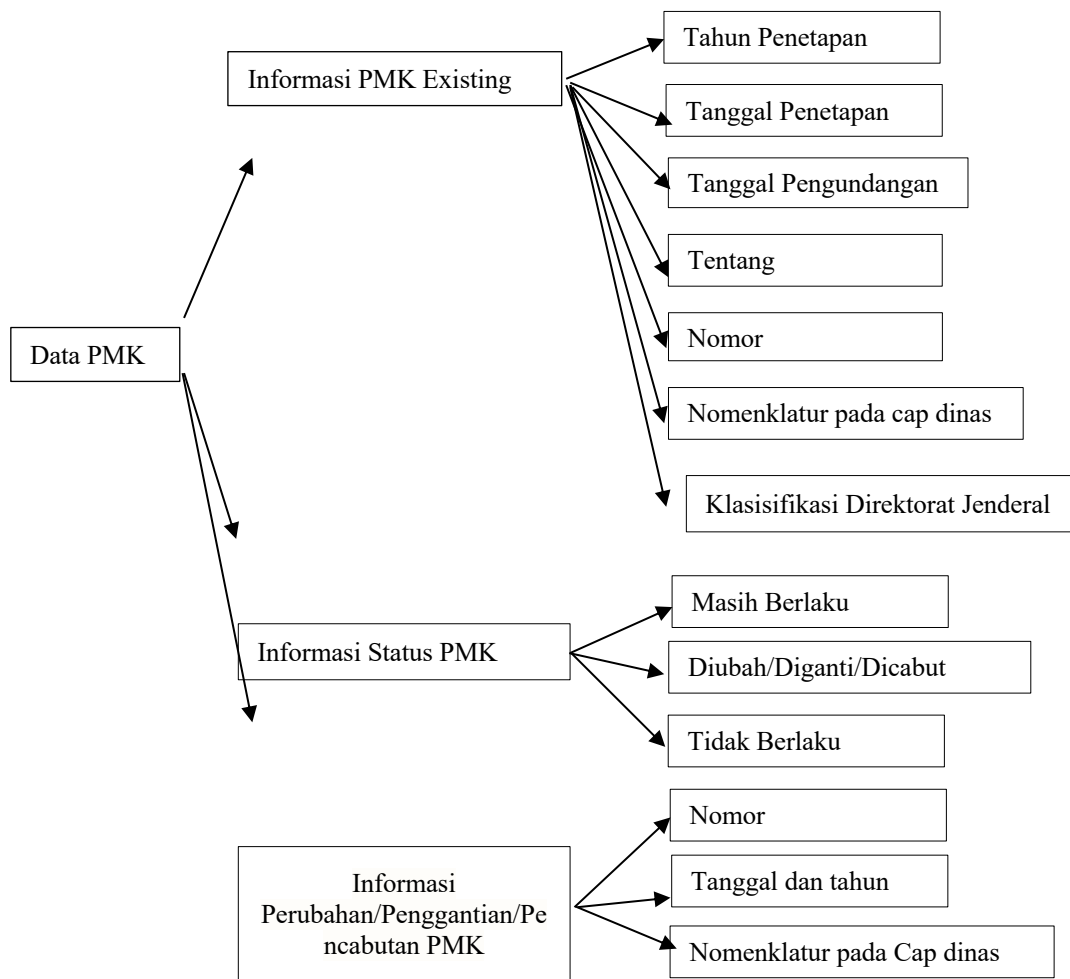
c. Sumber Daya Manusia

SDM pada Kementerian Keuangan bekerja sesuai petunjuk namun tidak di dasari bahwa telah terjadi perubahan dari departemen ke Kementerian namun semua produk hukumnya tetap menggunakan kata departemen.

d. Asset

Dalam label mengenai administrasi asset dan sarana dan pr sarana tetap menggunakan departemen karena dlaam Teknologi Indormasi yang digunakan tetap menggunakan departemen dan belum dilakukan perubahan.

Dari segi kelembagaan sudah tepat atau sesuai, dari sisi organisasi tidak sesuai karena merupakan aktivitas operasional yang diabaikan dan dari sisi SDM sudah tepat melaksanakan tugas dan tidak tidak ada bentuk kontra atau perlawanan namun ada pembiaran dan dari sisi asset atau sarana dan prasarana terdapat tidak menimbulkan kekurangan atau kelebihan jumlah namun tetap keliru penggunaan nomenkalturnya (Jacobson, 2019; Korenik & Wegrzyn, 2020; Lunenburg, 2012; Muksin, 2019).



Gambar 5. Flowchart garis perubahan/ penggantian/ pencabutan PMK

Flowchart ini digunakan untuk melakukan verifikasi pada saat dilakukan penelitian dalam periode tahun penelitian.

Tabel 4. Nomenklatur Pada Cap Dinas dengan Departemen

Tahun Penetapan	Nomenklatur pada Cap Dinas	Status PMK		Jumlah
		Berlaku	Tidak Berlaku	
2008	Departemen	8	4	12
2009	Departemen	4	8	12
2010	Departemen	4	8	12
Jumlah		16	20	36

Tabel 5. Nama Direktorat Jenderal Berwenang yang masih Memberlakukan PMK sampai saat dilakukan penelitian berdasarkan data terakhir diperoleh

Tahun	Jumlah PMK masih berlaku	Nama Direktorat Jenderal
2008	8	Direktorat Jenderal Pajak
2009	1	Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Pajak secara Bersama-sama

Implikasi Perubahan Nomenklatur Kementerian pada Sistem Administrasi dan Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Tahun	Jumlah PMK masih berlaku	Nama Direktorat Jenderal
	1	Direktorat Jenderal Pajak
	2	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2010	1	Direktorat Jenderal Anggaran dan atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara Bersama-sama
	2	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
	1	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tabel 6. Ringkasan APBN 2008 s.d 2010 (dalam miliar rupiah)-modifikasi peneliti dalam bentuk table

Uraian	2008		2009		2010	
	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP
Penerimaan Perpajakan	609.227,49	658.700,8	651.954,8	619.922,2	743.325,9	723.006,7

Bahwa nomenklatur PMK tidak sesuai.

Analisis Matriks Ambiguitas Konflik Matland

Bahwa PMK diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pada fungsi dan tugasnya namun tidak sesuai dengan penulisan nomenklatur pada periode tahun 2008 sampai tahun 2010 meskipun sudah ada perubahan sejak 2002 atas isi dan materi yang diterbitkan dan untuk mendukung penggambaran yang jelas diperlukan kuesioner pada beberapa pegawai di Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk analisa mengenai Lima Ketepatan Analisis Matland dan diketahui hasil sebagai berikut ini:

Tabel 7. Lima Ketetapan Hasil Olah Kuesioner

No	Ketepatan	Pilihan Jawaban (%)				
		1	2	3	4	5
1.	Ketepatan perubahan nomenklatur sudah tepat	21,74	39,13	300,00	78,26	82,61
2.	Ketepatan perubahan nomenklatur bagi pelaksanaanya	17,39	21,74	96,65	82,61	60,87
3.	Ketepatan perubahan nomenklatur sesuai target	43,78	73,91	143,48	134,78	65,22
4.	Ketepatan lingkungan atas perubahan nomenklatur	52,17	47,83	217,39	143,48	95,65
5.	Ketepatan proses perubahan nomenklatur	8,70	13,04	95,65	91,30	65,22

Catatan: bagi pelaksanaanya dimaksudkan pada semua pegawai yang melaksanakan tugas

Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa nomenklatur nama organisasi yang digunakan saat ini tidak sesuai dengan harapan responden atau standar yang seharusnya diterapkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nama organisasi dengan fungsi, tugas, atau peraturan yang berlaku. Responden dalam kuesioner cenderung memberikan tanggapan yang menunjukkan ketidaksesuaian ini, baik dari segi administratif maupun operasional.

Sementara itu, hasil wawancara mendukung temuan dari kuesioner dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi dari perubahan nomenklatur tersebut. Narasumber yang diwawancarai mengungkapkan bahwa

perubahan nama organisasi membawa konsekuensi tertentu, baik dalam aspek struktural, kebijakan, maupun persepsi publik. Selain itu, wawancara juga mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif tetapi juga mempengaruhi efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait nomenklatur organisasi guna memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku serta meningkatkan efisiensi dalam operasional organisasi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan Analisa Matland terhadap PMK memiliki ambiguitas yang rendah dan konflik yang rendah karena semua produk diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 namun tidak sesuai pada penulisan Departemen yang seharusnya adalah Kementerian. Dari Analisa Miles dan Huberman dapat diketahui bahwa secara kelembagaan perubahan nomenklatur sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara namun secara Organisasi Perubahan Nomenklatur terkait administrasi dan pelayanan publik khususnya pada Operasional Ketatalaksanaan pada aktivitas saat menggunakan PMK tidak sesuai dari tahun 2008 sampai dengan 2010 meskipun perubahan sudah terjadi sejak tahun 2002. Peneliti menemukan solusi yang disebut dengan *bona fide* pada setiap ketentuan peralihan dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya agar bila terjadi pergantian atau perubahan nama atau pemekaran Kementerian semua produk hukumnya tetap benar kecuali jika ada persoalan di materinya.

BIBLIOGRAFI

- Akbar, M. (2015). Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi. *Reformasi*, 5(2).
- Andiko, T., Handayani, S. R., & Mayowan, Y. (2018). Kajian Atas Otonomi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak (Studi Kasus Atas Wacana Pemisahan Wewenang Antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Asshiddiqie, J., Marx, W., Bornmann, L., Ezugwu, A. E., Shukla, A. K., Agbaje, M. B., Oyelade, O. N., José-García, A., & Agushaka, J. O. (2021). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. *Neural Computing and Applications*, 33(2).
- Asshiddique, J. (2005). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. In *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1). <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Daft, R. L. (2019). Organization Theory & Design. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Deng, E. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1). <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3011>

- Jacobson, D. (2019). Naturalistic Inquiry. In *International Encyclopedia of Human Geography, Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10579-7>
- Karyana, A. (2011). Ketidakpatutan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI): Perilaku Fraud. *Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara*.
- Korenik, D., & Wegrzyn, M. (2020). Public policy timing in a sustainable approach to shaping public policy. *Sustainability (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/su12072677>
- Lunenburg, F. C. (2012). Organizational Structure: Mintzberg's Framework. *International Journal for Scholarly, Academic, Intellectual Diversity*, 14(1).
- Muksin, M. (2019). Perubahan Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Agama Islam: Studi Perubahan Iain Menjadi Uin Dan Stain Menjadi Iain. *Kelola : Jurnal Sosial Politik*, 2(2).
- Puspasari, D., & Irawan, A. S. (2018). Evaluasi Kualitas Reviu Laporan Keuangan Kementerian: Studi pada Inspektorat Kementerian Pariwisata. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jaap.35334>
- Shienlia, M. (2022). Aktivitas Komunikasi Pelayanan Publik. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.597>
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2).
- Suaedi, F. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara. In *Reformasi Birokrasi dan e-Governance*.

Copyright holder:

Eko Susilo, Didik G. Suharto, Rinda Noviyanti (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

